

2016, Pacu Sektor Hulu dan Mengarah TI

Tabanan (Bali Post) -

Pada 2016 mendatang program pembangunan di Tabanan akan lebih memacu sektor hulu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Caranya, dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal dan memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi di dalamnya.

Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa mengungkapkan, arah program pembangunan tersebut merupakan hasil usulan yang dihimpun dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. "Di tingkat desa dan kecamatan, usulan yang dihimpun merupakan hasil aspirasi masyarakat, sedangkan di tingkat kabupaten, SKPD berperan mengkaji secara teknis," ungkapnya beberapa hari lalu.

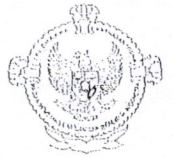
Ditambahkannya, RKPD Kabupaten Tabanan tahun depan merupakan masa transisi karena RPLMD 2011-2015 telah berakhir. Karenanya, seluruh SKPD mesti mendata dan menginventarisir target-target kinerja RPJMD yang telah dan belum berhasil dicapai yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait. "Seluruh SKPD diharapkan berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing, bijak menentukan prioritas, dan memanfaatkan data yang terbatas untuk mewujudkan pembangunan Tabanan dengan tetap mengakomodir usulan masyarakat," ucapnya.

Sejumlah program yang telah dijalankan akan terus dilanjutkan seperti program gerbang indah dan partisipatif infrastruktur, gerbang pangan, gerbang emas atau keramba emas, bedah rumah 500 unit, dan bedah warung 50 unit. Sementara program baru meliputi gerbang pariwisata dan perencanaan berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi mulai dari *e-musrenbang*, *e-rkpd*, *e-budgetting* sampai *e-monev*. "Kami sebut itu *fair plan*, yakni mengajak masyarakat dan *stakeholder* pembangunan bersama-sama membangun Tabanan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," paparnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, saat ini APBD dalam kondisi belum cukup untuk menutupi semua kebutuhan di masing-masing SKPD. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh pimpinan SKPD lebih efisien dalam menggunakan anggaran dan lebih mengoptimalkan kegiatan. Ditambahkannya, fiskal yang dibutuhkan untuk membiayai program kerja sekitar Rp 700 miliar, sedangkan saat ini fiskal Tabanan hanya Rp 25 miliar. Namun, meski minim APBD, Tabanan masih bisa sukses melaksanakan berbagai program walaupun belum maksimal. (kmb28)

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 14



Bupati Minta Pengawasan Proyek Diperketat



PROYEK - Bupati bersama Ketua DPRD I Ketut Sugiasa meninjau sejumlah proyek pembangunan di Dauharu.

Negara (Bali Post) -

Sejumlah proyek fisik yang mulai dikerjakan tahun ini, ditekankan agar mengutamakan sisi kualitas (hasil). Paling tidak, bangunan fisik yang dibangun bisa bertahan 10 sampai 15 tahun. Pihak pengawas juga didesak supaya betul-betul mengawasi dengan benar pengerjaan agar tidak muncul celah pemborong hanya meraup untung.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Jembrana I Putu Artha akhir pekan lalu saat meninjau sejumlah proyek. Bupati Artha bersama Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, meninjau pembangunan revitalisasi Pasar Umum Jembrana yang ada di Kelurahan Dauharu, proyek normalisasi banjir di Lingkungan Menega Dauharu, proyek trotoar di Pasar Tenten Kelurahan Banjar Tengah dan di Kelurahan Pendem.

Dalam setiap kunjungannya Bupati Artha menekankan agar proyek-proyek yang dibangun, bisa bertahan 10 sampai 15 tahun. "Pemborong jangan hanya mengejar keuntungan tetapi utamakan kualitas, percuma kita bangun dengan biaya besar dari uang rakyat, tapi baru setahun sudah rusak," tegas Artha. Ia juga meminta Kadis PU untuk merancang kualitas proyek fisik tahun berikutnya supaya mampu

bertahan hingga 15 tahun.

Ketika mengunjungi Pasar Jembrana, sejumlah pekerjaan menjadi sorotan bupati. Seperti saluran air limbah yang belum dikerjakan. Bupati menegaskan supaya saluran air yang dibuat harus bagus dan mengalir dengan baik termasuk mengintegrasikan seluruh pipa air yang mengalir ke dalam pasar supaya tidak semrawut. "Per-

cuma kalau pasarnya bagus tapi saluran airnya kotor dan jorok," kata Artha.

Sementara saat meninjau proyek drainase normalisasi banjir sepanjang 300 meter, Bupati menugaskan Kepala Lingkungan Menega untuk selalu mengawasi pengerjaan dan lahan sempadan drainase yang merupakan tanah negara supaya dibuat pertamanan.

Plt. Kadis Perindagkop I Made Sudantra mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan bupati. "Segera kami tindak lanjuti, karena itu memang harus dilakukan, terutama soal kualitas," kata Sudantra. Sementara itu Kadis PU Gusti Putu Mertadana mengaku akan memperketat pengawasan untuk menjaga kualitas proyek. (kmb26)

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 12



Dianggarkan Rp 1,4 Miliar Renovasi Terminal Bongkar Muat Barang^v

Singaraja (Bali Post) –

Setelah mengalami kerusakan parah sejak beberapa tahun, terminal bongkar muat barang Jalan Ahmad Yani Barat diparbaiki 2015 ini. Kepastian perbaikan ini setelah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng menderkan pekerjaan pengaspalan areal terminal bongkar muat barang tersebut. Selama pengerjaan proyek, Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng mengarahkan kendaraan angkutan barang untuk melakukan bongkar muat di Terminal Banyuasri, Singaraja.

Kepala Dinas PU Buleleng Nyoman Gede Suryawan, Minggu (13/9) kemarin mengatakan, anggaran pengaspalan areal terminal bersumber dari APBD Buleleng tahun 2015. Dari penyusun

dokumen perencanaan hingga pengerjaan fisik proyek ini menghabiskan anggaran Rp 1,4 miliar. Untuk menjaga daya tahan karena kendaraan yang masuk bertonase tinggi, maka akan dibangun konstruksi bawah dengan menggali areal terminal kemudian dipadatkan dan pelapisan aspal dengan agregat teknis yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan.

Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan, A.P. mengatakan, areal terminal sejak lama mengalami kerusakan parah. Hampir di seluruh areal terminal lapisan aspalnya telah mengelupas dan hanya menyisakan batu kerikil. Bahkan, akibat beban kendaraan, areal terminal banyak yang berlubang. Ketika kendaraan masuk atau keluar, debu kerap kali berterbangan,

sehingga sedikit mengganggu kenyamanan petugas terminal maupun warga yang tinggal di sekitar terminal.

Kerusakan ini diduga karena beban kendaraan yang masuk ke dalam terminal. Selain itu, kondisi tanah dalam kondisi labil, sehingga lapisan aspalnya tidak mampu bertahan lama.

Menurut mantan Camat Sawan ini, selama proses pengerjaan proyek aktivitas terminal bongkar muat barang dialihkan ke Terminal Banyuasri, Singaraja. Pemandahan untuk sementara ini sudah disosialisasikan kepada sopir angkutan barang. Karena memanfaatkan terminal angkutan umum, dipastikan akan terjadi ketidaknyamanan termasuk gangguan kelancaran lalu lintas. (kmb38)

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 7



Dispenda Genjot Penagihan Piutang PBB-P2

Singaraja (Bali Post) -

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belakangan ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, sejak pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan PBB kepada pemerintah daerah, piutang PBB-P2 di Buleleng jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di daerah ini pun mulai melakukan upaya penagihan piutang pajak tersebut. Namun sayang, penagihan ini masih belum optimal. Alasannya, ada hambatan serius masih ditemui di lapangan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng Ida Bagus Puja Erawan, S.H. dihubungi Minggu (13/9) kemarin mengatakan, sejak ditunjuk sebagai koordinator pungutan PBB-P2 upaya penagihan piutang PBB-P2 di daerahnya sudah dilakukan. Sayangnya, sejumlah hambatan serius masih dialami, sehingga penagihan yang dilakukan stafnya belum maksimal. Kendalanya antara lain relatif sulitnya melacak dokumen identitas wajib pajak (WP - red) dan objek pajak, karena tidak dilakukan penyesuaian dengan fakta riil di lapangan.

Puja mencontohkan, satu bidang tanah yang sudah lama dijual oleh pemiliknya, namun karena tidak dilaporkan kepada aparat terdekat, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)-nya itu tetap saja diterbitkan atas nama pemilik pertama. Karena tidak merasa memiliki objek pajak itu, sehingga pemilik tersebut membiarkan saja, dan otomatis memunculkan piutang PBB-P2. Bahkan nilainya makin bertambah. "Ini salah satu kendala kita menagih piu-

tang pajaknya. Ketidaksiplinan melaporkan perubahan identitas objek dan subjek pajak ini juga memicu munculnya piutang PBB di daerah kita," katanya.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng ini menambahkan, untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak, pihaknya saat ini akan memvalidasi ulang subjek dan objek piutang PBB di Bali Utara. Validasi ini penting dilakukan untuk menghitung persentase piutang PBB-P2 yang potensial ditagih. Sebaliknya, piutang PBB-P2 yang sama sekali tidak memungkinkan ditagih juga akan diketahui. Berdasarkan hasil validasi ini, Dispenda akan fokus menggenjot tagihan piutang yang memungkinkan dapat ditagih. Sedangkan piutang PBB yang tidak memungkinkan dapat ditagih, maka diambil upaya lanjutan seperti penghapusan piutang PBB. "Berapa persen PBB yang potensi ditagih dan berapa persen PBB yang tidak bisa ditagih. Kalau piutangnya macet yang tidak bisa ditagih dan

dibuktikan dengan data riil di lapangan, maka piutangnya akan dihapuskan," jelasnya.

Puja menambahkan, selain fokus menggarap penagihan piutang PBB, validasi ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat WP untuk melakukan perbaikan identitas subjek dan objek PBB-nya, yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Di samping itu, masyarakat WP juga bisa mengajukan keringanan PBB khususnya objek PBB berupa lahan pertanian. Apalagi, akhir-akhir ini lahan pertanian ini banyak yang terkena dampak kenaikan pajak, yang mereka bayar akibat banyaknya lahan telah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi bangunan. "Setelah data WP ini berhasil kita validasi, maka piutang pajak bisa ditagih. Dan tahun berikutnya tidak lagi muncul piutang. Kenaikan pajak yang disebabkan lahan sawah beralih fungsi itu, bisa dimohonkan keringanan pajak sesuai komitmen pemerintah daerah," imbuh Puja Erawan. (kmb38)

Edisi : Senin, 14 September 2015

Hal : 11